

BAB I

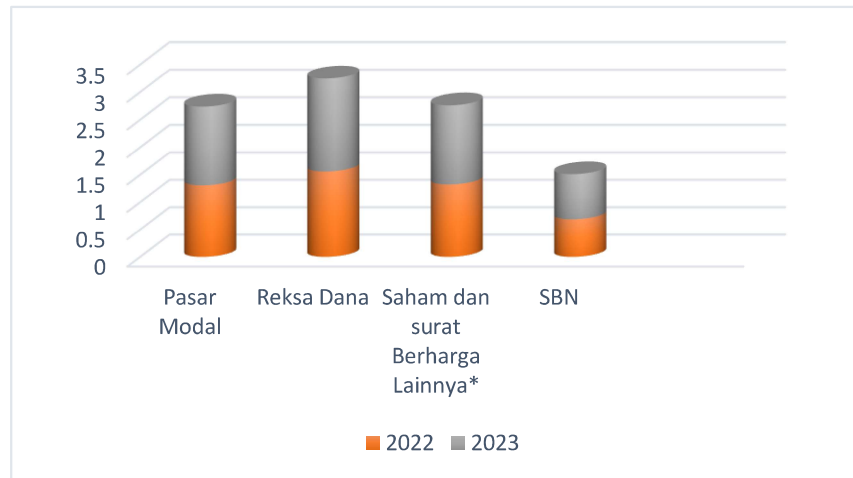
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring masuknya globalisasi di Indonesia, tentu membuat berbagai daerah di Indonesia harus mampu menghadapi tantangan dan peluang dengan adanya globalisasi tersebut. Pemerintah perlu melakukan inovasi terkait pembangunan di dalam negeri yang tentunya memerlukan dana yang besar yang dimana tidak bisa sepenuhnya dana tersebut diambil dari dana pemerintah. Oleh karena itu, Indonesia masih sangat memerlukan kegiatan penanaman modal yang berasal dari dalam dan luar negeri yang dilakukan baik pihak swasta maupun pihak pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Tujuan dari adanya penyelenggaraan penanaman modal antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal di Indonesia memegang peranan penting dalam hal kemajuan negara dan daerah. Hal tersebut dikarenakan penanaman modal merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan suatu negara maupun daerah. Jumlah investor yang masuk di Indonesia memang sudah banyak, namun pemerintah Indonesia tetap terus melakukan berbagai upaya dengan membuat kebijakan agar dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan tersebut, tentunya membuat jumlah kegiatan penanaman modal atau investasi di Indonesia terus

meningkat. Grafik pertumbuhan investasi di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



**Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Investasi di Indonesia
Tahun 2022-2023**

(Sumber: Data diolah peneliti, 2023)

Pada Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwasanya pertumbuhan penanaman modal atau investasi di Indonesia dari tahun 2022 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan baik dari pasar modal, reksa dana, saham dan surat berharga lainnya, serta SBN (Surat Berharga Syariah Negara). Kenaikan investasi pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tersebut diataranya pada pasar modal sebesar 12,37%, reksa dana sebesar 13%, saham dan surat berharga lainnya sebesar 11,46%, serta SBN sebesar 13,42%. Dengan hal tersebut tentu menunjukkan bahwasanya perkembangan kegiatan penanaman modal menjadi prioritas bagi pemerintah.

Perkembangan penanaman modal yang terjadi di Indonesia tentu dipengaruhi oleh adanya sinergi dari berbagai daerah di Indonesia. Dukungan dari pemerintah daerah tersebut tentu mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat menarik minat para investor untuk melakukan penanaman modal atau investasi di berbagai daerah di Indonesia. Dengan hal tersebut tentunya

menyebabkan pertumbuhan investasi hampir di seluruh provinsi di Indonesia juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Menurut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2023, Realisasi investasi di setiap provinsi di Indonesia terus mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya dimana salah satunya yaitu pada Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kenaikan sekitar 7.994,9 Milyar pada tahun 2022-2023. Dengan adanya peningkatan jumlah investasi di Provinsi Jawa Tengah tersebut tentu membuktikan bahwasanya kegiatan investasi merupakan kegiatan unggulan di Provinsi Jawa Tengah yang tentunya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk terus melakukan berbagai upaya dalam peningkatan kegiatan investasi. Menurut Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Tengah, salah satu kawasan di Provinsi Jawa Tengah yang terus mengalami peningkatan dalam kegiatan investasi adalah kawasan yang masuk dalam Eks-Karisidenan Surakarta/ Solo Raya. Berikut dapat dilihat realisasi investasi pada Eks-Karisidenan Surakarta pada tabel 1.1:

Tabel 1.1 Realisasi Investasi Solo Raya Tahun 2022-2023

No	Kabupaten/ Kota	Realisasi Investasi 2022-2023 (Triliun)
1.	Klaten	9.915
2.	Sukoharjo	8.339
3.	Karanganyar	8.722
4.	Boyolali	8.339
5.	Surakarta	8.261
6.	Sragen	4.406
7.	Wonogiri	3.657

Sumber: Kadin Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan data dari Kadin Jawa Tengah terkait realisasi investasi di Kawasan Solo Raya tahun 2022-2023 seperti pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwasanya terdapat 7 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kawasan Solo Raya

seperti Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kota Surakarta. Namun dari 7 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kawasan Solo Raya tersebut, Kabupaten Boyolali menempati posisi keempat dengan realisasi investasi sebesar 8,339 Triliun. Dengan hal tersebut tentunya membuktikan bahwasanya kegiatan penanaman modal di Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya berjalan baik.

Kabupaten Boyolali merupakan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Sleman (DIY) serta Kabupaten Magelang. Dengan hal tersebut membuat Kabupaten Boyolali memiliki potensi yang cukup besar di berbagai sektor investasi. Boyolali memiliki banyak potensi, seperti sektor pertanian, pariwisata, industri, dan lain-lain. Namun, jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang memiliki sektor serupa, Kabupaten Klaten juga memiliki sektor pertanian yang besar, telah lebih berhasil menarik investor untuk sektor agribisnis dan industri pengolahan hasil pertanian. Kabupaten Klaten telah mengembangkan sektor industri pengolahan yang berbasis pada produk pertanian lokal, yang memberikan nilai tambah bagi produk merek. Kabupaten Klaten tercatat memiliki lebih dari 50 usaha pengolahan produk pertanian yang berkembang dengan baik, sedangkan Kabupaten Boyolali hanya memiliki sedikit usaha serupa. Ini menunjukkan adanya perbedaan dalam pengelolaan sektor pertanian yang berpotensi untuk meningkatkan investasi. Selain itu, pada Kabupaten Kudus memiliki akses yang lebih baik terhadap investasi, terutama di sektor industri, dan lebih merata dalam distribusi pembangunan ekonominya. Sementara itu, Kabupaten Boyolali memiliki ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat dan daerah pedesaan yang lebih besar. Pada Kabupaten Kudus, hampir 80% industri kecil dan menengah telah tersebar di berbagai kecamatan, sementara di Kabupaten Boyolali, industri masih terkonsentrasi di wilayah kota, dengan sebagian besar desa masih bergantung pada pertanian tradisional. Dengan

hal tersebut, Kabupaten Boyolali membutuhkan kebijakan dan infrastruktur yang lebih merata agar investasi dapat merata ke seluruh wilayah, dan tidak hanya terkonsentrasi di daerah pusat kota yang sudah relatif berkembang.

Dalam kegiatan penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Boyolali terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal salah satunya dengan membuat kebijakan terkait penanaman modal. Kebijakan terkait penanaman modal di Kabupaten Boyolali diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan penanaman modal sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dapat berjalan kondusif dan lancar. Kebijakan penanaman modal yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali sendiri sering dikenal dengan Kebijakan Pro Investasi.

Kebijakan Pro Investasi merupakan kebijakan unggulan terkait dengan kegiatan penanaman modal yang dimana juga dijadikan sebagai visi dan *branding* di Kabupaten Boyolali sejak tahun 2014 sampai sekarang. Kebijakan Pro Investasi memuat adanya kemudahan penanaman modal, pemantapan dan peningkatan pro investasi, kemudahan informasi dan data, optimalisasi kerja pelayanan birokrasi, hak kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, dan kepastian hukum. Kebijakan Pro Investasi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 9 tahun 2022 tentang penanaman modal dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2016 tentang rencana umum penanaman modal Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2025.

Kebijakan Pro Investasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali juga tidak terlepas dari peran serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). DPMPTSP merupakan lembaga pemerintah yang membantu bupati melaksanakan urusan pemeritahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam menjalankan tugasnya, DPMPTSP berpedomankan pada Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Boyolali. Dengan hal tersebut tentunya dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi, DPMPTSP harus mampu menunjang kegiatan penanaman modal di Kabupaten Boyolali berjalan lancar yang dimana salah satunya menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam penanaman modal sesuai dengan isi pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 9 tahun 2022 tentang penanaman modal. Salah satu bentuk sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan penanaman modal agar berjalan lancar yaitu infrastruktur jalan yang memadai. Infrastruktur jalan tentu merupakan salah satu faktor penting di dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal karena dengan adanya infrastruktur jalan yang memadai tentu akan memudahkan akses ke lokasi investasi, baik untuk investor maupun tenaga kerja. Selain itu, wilayah dengan infrastruktur jalan yang memadai cenderung lebih menarik bagi investor karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kegiatan ekonomi khususnya dalam kegiatan penanaman modal. Dengan hal tersebut tentunya infrastruktur jalan merupakan faktor yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal. Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa infrastruktur jalan yang kurang memadai untuk menunjang kegiatan penanaman modal yang dimana dapat dilihat pada gambar 1.3:



Gambar 1.2 Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Kab. Boyolali

(Sumber: Observasi oleh peneliti, 2024)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada gambar 1.3 menunjukkan bahwasanya masih terdapat infrastruktur jalan yang kurang memadai pada salah satu daerah di Kabupaten Boyolali karena masih adanya lubang-lubang pada jalan tersebut. Dengan adanya kondisi infrastruktur jalan yang rusak tersebut tentu akan menyebabkan kegiatan penanaman modal terganggu karena jalan tersebut digunakan sebagai pendukung mobilitas para investor. Selain itu, pada kecamatan tersebut juga memiliki banyak potensi untuk dilakukan penanaman modal sehingga DPMPTSP harus menjamin infrastruktur jalan dalam kondisi yang baik dan layak untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal.

Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Boyolali sendiri memiliki berbagai macam sektor investasi. Namun dari banyaknya jenis sektor yang ditawarkan di Kabupaten Boyolali sendiri, sektor industri menjadi sektor yang mendominasi kegiatan investasi sehingga sektor industri menjadi sektor utama atau unggulan dalam kegiatan investasi di Kabupaten Boyolali. Dalam kaitannya pelaksanaan investasi pada sektor industri, DPMPTSP Kabupaten Boyolali melakukan pengelompokan wilayah Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dimana dilakukan agar kegiatan penanaman modal dapat berjalan baik. Pengelompokan status wilayah KPI dapat dilihat pada tabel 1.2:

**Tabel 1.2 Pengelompokan Status Wilayah KPI
Di Kabupaten Boyolali**

No	Kecamatan	Status KPI	No	Kecamatan	Status KPI
1.	Ampel	Masuk	12.	Mojosongo	Masuk
2.	Cepogo	Masuk	13.	Klego	Masuk
3.	Banyudono	Masuk	14.	Sawit	Masuk
4.	Teras	Masuk	15.	Wonosegoro	Masuk
5.	Sambi	Masuk	16.	Nogosari	Masuk
6.	Ngemplak	Masuk	17.	Karanggede	Tidak Masuk
7.	Andong	Masuk	18.	Kemusu	Masuk

No	Kecamatan	Status KPI	No	Kecamatan	Status KPI
8.	Juwangi	Masuk	19.	Wonosamudro	Masuk
9.	Gladagsari	Masuk	20.	Musuk	Tidak Masuk
10.	Selo	Masuk	21.	Tamansari	Tidak Masuk
11.	Simo	Masuk	22.	Boyolali	Masuk

Sumber: BP3D Kabupaten Boyolali, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwasanya masih terdapat beberapa Kecamatan di Kabupaten Boyolali yang belum masuk ke dalam kawasan peruntukan industri (KPI) seperti Kecamatan Karanggede, Musuk, dan Kecamatan Tamansari. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan isi dari Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2016 tentang rencana umum penanaman modal Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2025 yang dimana menjelaskan bahwasanya Kecamatan Karanggede masuk kedalam wilayah pengembangan sektor industri besar dan menengah, dan untuk sektor industri kecil mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Boyolali termasuk Kecamatan Musuk dan Kecamatan Tamansari. Dengan ketidaksesuaian data wilayah yang masuk ke dalam status KPI tersebut tentu membuat Kecamatan Karanggede sulit untuk dilakukan kegiatan investasi khususnya dalam bidang industri yang dimana dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut:



Gambar 1.3 Berita Gagalnya Investor Sepatu Masuk Di Kab. Boyolali

(Sumber: Solopos diolah peneliti, 2023)

Berdasarkan berita dari SoloPos (2023) diatas menunjukkan bahwasanya pernah ada pabrik sepatu yang ingin membidik Desa Bantengan, Karanggede untuk investasi karena dekat dengan pintu tol. Namun, dikarenakan desa

Bantengan tidak termasuk Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sehingga menyebabkan calon investor tersebut gagal masuk karena tidak mendapatkan izin berinvestasi. Dengan hal tersebut tentunya menunjukkan bahwasanya pengembangan peluang potensi penanaman modal pada sektor industri belum berjalan optimal dikarenakan adanya kecamatan yang seharusnya masuk dalam KPI sesuai dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2016 tentang rencana umum penanaman modal Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2025 namun pada kenyataannya belum masuk kedalam wilayah KPI sehingga menyebabkan calon investor sulit untuk melakukan investasi disana.

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal sendiri tentunya calon investor juga harus melakukan proses perizinan terlebih dahulu yang dimana proses perizinan dalam penanaman modal di Kabupaten Boyolali sendiri telah menggunakan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission (OSS RBA)*. Penggunaan sistem *OSS RBA* pada proses perizinan penanaman modal bertujuan untuk memudahkan para calon investor karena proses perizinan lebih sederhana, langsung dapat diakses, dan tidak harus memakai perantara. Dengan hal tersebut tentunya dapat meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan keterjaminan dalam mendapatkan izin berusaha. Tampilan sistem *OSS RBA* dapat dilihat pada gambar 1.5 berikut:



Gambar 1.4 Sistem *Online Single Submission (OSS RBA)*

(Sumber: DPMPSTP Kab. Boyolali, 2024)

Berdasarkan wawancara dengan kepala DPMPTSP Kabupaten Boyolali, mekanisme investasi di Boyolali yang telah berbasis risiko melalui Sistem *Online Single Submission (OSS RBA)* justru membuat calon investor mengalami kesulitan untuk menggunakan sistem perizinan tersebut meskipun sebenarnya calon investor dapat mengakses sendiri. Dengan kesulitan yang dialami calon investor tersebut tentu membuat calon investor harus melakukan konsultasi dengan DPMPTSP secara berulang-ulang sebelum menggunakan sistem tersebut yang dimana membuat kegiatan perizinan berjalan kurang efektif dan efisien.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala DPMPTSP Kabupaten Boyolali, terdapat beberapa keluhan dari para investor terutama investor dengan resiko menengah hingga tinggi karena persyaratan yang harus dilampirkan cukup banyak dan berbeda dengan usaha risiko rendah yang dimana untuk persyaratan usaha dengan risiko menengah hingga tinggi calon investor harus melampirkan juga terkait persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan izin lingkungan yang dimana memerlukan waktu yang lama. Dengan hal tersebut tentunya menimbulkan keluhan oleh para investor karena waktu penerbitan surat izin penanaman modal bagi calon investor dengan risiko menengah hingga tinggi tersebut memerlukan waktu yang lama.

Penelitian yang dilakukan oleh Insyirah Nisa Alfaizah, Widiya Avianti (2024) menunjukkan bahwa Kebijakan Investasi Asing Langsung di Kabupaten Purwakarta telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PDRB dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi biaya logistik. Dari sisi eksternal, kekuatan kebijakan ini terletak pada sumber daya alam yang melimpah dan lokasi strategis. Namun, kelemahan seperti keterbatasan akses pasar dan kurangnya inovasi menghambat potensi kebijakan. Oleh karena itu, meskipun ada kontribusi positif, diperlukan upaya untuk mengatasi kelemahan ini agar kebijakan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Penelitian yang dilakukan Chairil Anwar, Notika Rahmib, dkk (2021) menunjukkan bahwa Kebijakan *tax holiday* dalam meningkatkan investasi di Indonesia pada 2017 tidak efektif karena kurangnya kepastian hukum, persyaratan berat, dan tidak menjadi faktor utama bagi investor asing. Pada 2018, meskipun lebih banyak investor yang menerima fasilitas, efektivitasnya masih terbatas, tercermin dari penurunan investasi asing. Kendala seperti birokrasi tidak efisien, inkonsistensi regulasi, dan masalah perizinan lahan juga menghambat implementasi. Sistem *OSS* sering mengalami gangguan teknis, dan banyak investor belum terbiasa dengan sistem ini. Untuk meningkatkan efektivitas, BKPM dan Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan pengawasan dan kepatuhan investor.

Meskipun berbagai kebijakan telah dilakukan untuk menarik investasi namun pada kenyataannya masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, sebagian besar fokus penelitian lebih menekankan pada kebijakan investasi di tingkat nasional, sedangkan analisis mendalam mengenai evaluasi Kebijakan Pro Investasi di daerah masih terbatas. Selain itu, juga belum adanya kajian yang mendalam mengenai dampak pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis evaluasi Kebijakan Pro Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Boyolali.

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Pengembangan peluang potensi penanaman modal di sektor industri belum optimal karena terdapat kecamatan yang seharusnya masuk kedalam KPI sesuai dengan isi Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2016 tentang rencana umum penanaman modal Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2025 namun pada kenyataannya belum masuk kedalam KPI karena adanya

perbedaan pemetaan daerah kawasan hijau yang dilakukan oleh BP3D dan DPMPTSP.

- b. Para investor masih mengalami kesulitan untuk menggunakan *Sistem Online Single Submission* atau *OSS RBA* dalam halnya melakukan perizinan penanaman modal dimana sistem tersebut sering mengalami gangguan atau *server down* yang menyebabkan proses perizinan menjadi terhenti.
- c. Adanya keluhan dari para investor karena persyaratan bagi usaha dengan risiko menengah hingga tinggi yang harus dilampirkan cukup banyak dan berbeda dengan usaha risiko rendah yang dimana membuat waktu penerbitan surat izin bagi calon investor dengan risiko menengah hingga tinggi memerlukan waktu yang lama bahkan melebihi batas ketentuan waktu terbit izin usaha yang telah ditentukan oleh DPMPTSP.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada indentifikasi masalah, main research question pada penelitian ini yaitu mengapa pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Boyolali belum berhasil?

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penilaian hasil Kebijakan Pro Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Boyolali dilihat dari *input*, proses, *output*, dan *outcome*?
2. Apa saja faktor penghambat penilaian hasil Kebijakan Pro Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Boyolali?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penilaian hasil Kebijakan Pro Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Boyolali dilihat dari *input*, proses, *output*, dan *outcome*.

2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat penilaian hasil Kebijakan Pro Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Boyolali.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan referensi bagi kajian kebijakan publik pada Ilmu Administrasi Publik.
 - b. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai atau hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi Kebijakan Pro Investasi untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan informasi, masukan serta pertimbangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan Kebijakan Pro Investasi di Kabupaten Boyolali.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali dalam mengevaluasi Kebijakan Pro Investasi.

1.6 Tinjauan Pustaka (*Literatur Review*)

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam memberikan bahan perbandingan dan acuan. Melalui analisis terhadap hasil penelitian sebelumnya, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang perkembangan topik yang sedang diteliti, mengidentifikasi kekurangan dalam penelitian sebelumnya, serta mengetahui metodologi peneliti lain. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini, penulis menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pemahaman, penulis menyajikan hasil penelitian terdahulu dalam bentuk tabel 1.3 :

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL, PENELITIAN, TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Hambatan Kebijakan Investasi Indonesia Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Omnibus Law, Oki Purnomo; Suyatno, 2024	Menganalisis hambatan kebijakan investasi di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui omnibus law	Menggunakan metode penelitian deskriptif analitis	Secara keseluruhan, Omnibus Law menawarkan potensi besar untuk meningkatkan investasi di Indonesia dengan menyederhanakan regulasi, mengurangi hambatan birokrasi, dan memberikan kepastian hukum. Namun, tantangan yang terkait dengan ketidakonsistenan antara peraturan pusat dan daerah, reaksi publik yang negatif, dan hambatan birokrasi lainnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini membutuhkan perhatian dan perbaikan yang lebih lanjut. Keterlibatan publik, koordinasi antara pusat dan daerah, dan pemantauan implementasi adalah langkah penting yang perlu diambil agar kebijakan ini benar-benar dapat mendukung peningkatan investasi di Indonesia secara efektif dan berkelanjutan.
2.	Kebijakan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan di Indonesia, Zahwa Tiara Syahidah; Zulfania; Suci Afriyanti; Siska Nurseha; Arif Fadilla, 2024	Menganalisis dampak Kebijakan Investasi terhadap Nilai Perusahaan menggunakan sampel perusahaan di Indonesia	Menggunakan metode kualitatif	Kebijakan investasi yang tepat dan strategis dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan memperbaiki kinerja operasional, daya saing, dan pengelolaan risiko. Keputusan investasi yang berbasis data dan diselenggarakan dengan strategi jangka panjang juga meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat posisi perusahaan, dan memastikan keberlanjutan.

NO	JUDUL, PENELITI, TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
3.	Analisis Analisis Kebijakan Tax Allowance yang Lebih Pro Investasi, Yogi Michael Matondang, 2024	Menganalisis desain kebijakan <i>tax allowance</i> di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip insentif pajak untuk investasi agar lebih Pro Investasi.	Penelitian ini bersifat kualitatif. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan studi kasus.	Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala penting untuk memaksimalkan nilai bagi investor dan menjaga daya saing perusahaan. Desain kebijakan <i>tax allowance</i> di Indonesia belum efektif dalam meningkatkan investasi karena kriteria yang rumit, syarat kompensasi kerugian yang sulit dipenuhi, serta insentif yang terlalu awal dan durasinya singkat. Pengurangan penghasilan neto yang sulit dimanfaatkan juga mengurangi daya tarik kebijakan ini. Oleh karena itu, perlu penyederhanaan kriteria, perpanjangan durasi insentif, dan peningkatan fleksibilitas untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini dalam menarik investasi.
4.	Analisis Kebijakan Investasi Asing Langsung (FDI) dan Infrastruktur dalam Mendukung Produk Domestik Bruto Daerah di Kabupaten Purwakarta, Insyirah Nisa Alfaizah; Widiya Avianti, 2024	Menganalisis Kebijakan Investasi Asing Langsung dan Infrastruktur dalam mendukung Produk Domestik Regional Bruto	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Analisis SWOT dan Fishbone Diagram	Kebijakan investasi asing langsung di Kabupaten Purwakarta telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PDRB dan pembangunan infrastruktur, yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi biaya logistik. Dari sisi eksternal, kekuatan kebijakan ini terletak pada sumber daya alam yang melimpah dan lokasi strategis. Namun, kelemahan seperti keterbatasan akses pasar dan kurangnya inovasi menghambat

NO	JUDUL, PENELITIAN, TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
5.	Kebijakan Investasi Hijau dalam Perundang-Undangan Indonesia Sebagai Upaya Penurunan Emisi Grk Nasional Menuju E-NDC 2030, Annisa Dinda Soraya, 2023	Menganalisis Kebijakan Investasi Hijau dalam Perundang-Undangan Indonesia Sebagai Upaya Penurunan Emisi Grk Nasional Menuju E-NDC 2030	Menggunakan metode deskriptif analitis	<p>potensi kebijakan. Oleh karena itu, meskipun ada kontribusi positif, diperlukan upaya untuk mengatasi kelemahan ini agar kebijakan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Meskipun Indonesia telah mengatur investasi hijau melalui regulasi seperti Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden, implementasinya masih belum optimal. Regulasi yang komprehensif penting untuk memberikan kepastian hukum dan meyakinkan investor, namun tantangan seperti kurangnya koordinasi, implementasi yang belum maksimal, dan kurangnya pengawasan menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan untuk memastikan regulasi dapat diterapkan secara efektif dan menarik lebih banyak investor dalam proyek keberlanjutan lingkungan</p>
6.	Perumusan Isu Strategis Kebijakan Investasi pada Sektor Pariwisata di Indonesia Berbasis Berita Media Online, Raditya, 2023	Mengidentifikasi isu-isu strategis yang muncul dalam pemberitaan media massa online yang berkaitan dengan kebijakan peningkatan investasi pada sektor pariwisata di Indonesia	Menggunakan metode penelitian campuran (<i>mixed method</i>) yaitu menggunakan metode Kuantitatif (pemodelan topik <i>Latent Dirichlet Allocation (LDA)</i>) dan kualitatif (Analisis	<p>Tiga aspek strategis dalam Kebijakan Investasi Pariwisata Indonesia adalah aktor, tindakan, dan faktor. Aktor merupakan aspek yang paling kompleks karena melibatkan banyak institusi. Koordinasi antar aktor sangat penting untuk kesuksesan kebijakan. Metode LDA dan TNA digunakan untuk menganalisis wacana publik dari media online, mengidentifikasi isu-isu</p>

NO	JUDUL, PENELITI, TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
7.	Analisis Pengaruh Kebijakan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan Di Indonesia, Emilda; Nabila Nur Rahma; Maharani, 2021	Mengetahui pengaruh kebijakan investasi dan pembiayaan modal kerja perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan.	Menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder	strategis, dan mengategorikannya sebagai isu positif atau negatif. Kategorisasi ini membantu meningkatkan kualitas respons kebijakan agar lebih tepat sasaran dan efektif. Kebijakan pembiayaan investasi memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Sementara itu, kebijakan pembiayaan modal kerja berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada subsektor kosmetik dan peralatan rumah tangga di Indonesia (2014-2019), di mana semakin tinggi kewajiban lancar yang digunakan untuk membiayai aset, semakin tinggi ROA perusahaan. Ini mengindikasikan bahwa pembiayaan modal kerja yang agresif dapat meningkatkan laba karena beban biaya hutang yang rendah.
8.	Evaluasi Efektivitas Kebijakan Tax Holiday Dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia, Chairil Anwar Pohana; Notika Rahmib; Pebriana Arimbhic; Indah Mawarnid; Maria Apriliani J.Tembaru, 2021	Menganalisis efektivitas kebijakan tax holiday dalam meningkatkan investasi di Indonesia pada tahun 2017 dan 2018 serta menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghalang dan pendorong efektivitas kebijakan tax	Menggunakan metode deskriptif kualitatif	Kebijakan <i>tax holiday</i> dalam meningkatkan investasi di Indonesia pada 2017 tidak efektif karena kurangnya kepastian hukum, persyaratan berat, dan tidak menjadi faktor utama bagi investor asing. Pada 2018, meskipun lebih banyak investor yang menerima fasilitas, efektivitasnya masih terbatas, tercermin dari penurunan investasi asing. Kendala seperti birokrasi tidak efisien, inkonsistensi regulasi,

NO	JUDUL, PENELITIAN, TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
		holiday dalam meningkatkan investasi di Indonesia		dan masalah perizinan lahan juga menghambat implementasi. Sistem OSS sering mengalami gangguan teknis, dan banyak investor belum terbiasa dengan sistem ini. Untuk meningkatkan efektivitas, BKPM dan Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan pengawasan dan kepatuhan investor.
9.	Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Percepatan Investasi dan Kemudahan Berusaha di Era Otonomi Daerah, Aziz Widhi Nugroho; Lita Tyesta Addy; Listya Wardhani, 2020	Menganalisis regulasi kebijakan pro investasi Kabupaten Wonogiri	Menggunakan metode normative deskriptif	Investasi berdampak positif pada pengembangan daerah, baik fisik maupun non-fisik. Regulasi yang harmonis diperlukan untuk mendukung penanaman modal di Kabupaten Wonogiri. Investor membutuhkan regulasi yang mudah dan cepat untuk memulai usaha, sementara pengembangan usaha lokal harus didorong melalui insentif dan promosi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi dan pertumbuhan usaha.
10.	Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Keputusan Investasi Di Sektor Industri Kreatif, Welly Surjono, 2020	Menganalisis pengaruh kebijakan pajak terhadap investasi di sektor industri kreatif	Menggunakan Pendekatan deskriptif kualitatif	Kebijakan pajak mempengaruhi biaya investasi, dan insentif pajak dapat meningkatkan daya tarik sektor industri kreatif. Reformasi pajak yang inklusif diperlukan untuk mendukung usaha kecil dan menengah. Penyederhanaan sistem perpajakan akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan administratif. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku

NO	JUDUL, PENELITIAN, TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
				<p>industri juga penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif dan adaptif.</p>
11.	<p><i>Responsible Business Conduct in the European Union's Investment Policy, Janina Witkowska, 2024</i></p>	<p><i>an assessment of the potential impact of the provisions on CSR/RBC included in the EU's international trade / investment</i></p>	<p><i>employs qualitative methods</i></p>	<p><i>The EU promotes Responsible Business Conduct (RBC) and CSR through soft measures, as they remain voluntary, with trade sanctions as a last resort. The new WTO Investment Facilitation for Development (IFD) Agreement is expected to shift EU policy towards facilitating foreign investment in developing countries.</i></p>
12.	<p><i>The Geoeconomic Turn in EU Trade and Investment Policy: Implications for Developing Countries, Clara Weinhardt; Ferdi De Ville, 2024</i></p>	<p><i>analyses the potential implications of new EU autonomous trade and investment policy instruments for developing countries, and how the EU has taken these consequences into account when designing them.</i></p>	<p><i>employs qualitative methods</i></p>	<p><i>Trade-off between geoeconomic and development objectives is more significant in sustainability-related policies than in those focused on competitiveness and security. Despite some proposals, differential treatment of developing countries is rarely incorporated into sustainability instruments. The geoeconomic shift has complicated the alignment of these objectives within the EU's trade and investment policies, often pushing development concerns to the background.</i></p>
13.	<p><i>Investment policy of Ukraine during full-scale war: immediate measures and future perspectives,</i></p>	<p><i>analyze Ukraine's investment policy in conditions of full-scale Russian aggression and to justify possible directions</i></p>	<p><i>employs qualitative methods</i></p>	<p><i>Ukraine has taken key steps to stimulate investment, including identifying priority sectors, implementing risk insurance agreements, and creating the "Advantage Ukraine" platform. The state investment policy</i></p>

NO	JUDUL, PENELITIAN, TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE	HASIL PENELITIAN
	<i>Natalia Husieva; Oleksii Niemets, 2024</i>	<i>for its improvement based on modern foreign approaches</i>		<i>focuses on reducing privatization, deregulation, and aligning with EU norms. Significant actions such as acquiring EU candidate status, removal of export tariffs, visa-free transport with the EU, tax deferrals, digitization, and integration into the European energy system have enhanced Ukraine's investment image, demonstrating its resilience and adaptability.</i>
14.	<i>Investment policy of the state as a tool for economic growth of the country, Valentyna Makohon; Yurii Radionov; Iryna Adamenko, 2020</i>	<i>analyzes the share of capital investment in GDP, the index of fixed capital investment for 2015–2019, and assesses the investment policy determinants of the state of developed countries and emerging countries</i>	<i>employs qualitative methods</i>	<i>That macroeconomic balance promotes business activity, as state investment policies can drive economic transformation and innovation. Data from 2015-2019 shows that the effectiveness of state investment policy in boosting economic growth depends heavily on the development of financial institutions and the financial market infrastructure. The results indicate that the impact of state investment policies is more pronounced in countries with stronger financial systems.</i>

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada tabel 1.4, Penelitian yang dilakukan penulis merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Insyirah Nisa Alfaizah pada tahun 2024 dengan judul Analisis Kebijakan Investasi Asing Langsung (FDI) dan Infrastruktur dalam Mendukung PDRB Daerah di Kabupaten Purwakarta. Kekuatan penelitian ini yaitu adanya fokus pada dampak FDI terhadap PDRB dan pembangunan infrastruktur, memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara investasi asing dan pertumbuhan ekonomi daerah, Penggunaan analisis SWOT dan *Fishbone Diagram* memudahkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kebijakan investasi di Purwakarta. Namun penelitian ini terbatas pada satu daerah saja yaitu di Purwakarta, sehingga kesimpulannya mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan di daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda serta Fokus yang terlalu banyak pada analisis makro dan kurang pada mikro ekonomi. Penelitian ini dapat memberi pedoman bagi daerah lain yang ingin mengembangkan kebijakan serupa, terutama dalam hal memanfaatkan FDI untuk pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, penelitian lainya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Zahwa Tiara Syahidah, dkk., 2024 yang berjudul Kebijakan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana kebijakan investasi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan meningkatkan daya saingnya serta penggunaan data perusahaan sebagai sampel memberikan kejelasan tentang dampak kebijakan terhadap perusahaan secara langsung. Namun, penelitian ini tidak mengidentifikasi faktor eksternal lainnya, seperti persaingan industri atau kondisi makroekonomi. Penelitian ini memberikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk lebih fokus pada kebijakan investasi yang bisa meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia dan keberlanjutan usaha jangka panjang. Penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap pemahaman kebijakan investasi di Indonesia.

1.6.2 Landasan Teori

1.6.2.1 Administrasi Publik

1.6.2.1.1 Pengertian Administrasi Publik

Menurut Dr. Sondang Siagian dalam Siti Marwiyah (2022: 1), administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas guna meraih tujuan, sedangkan Soewarno dalam Siti Marwiyah (2022: 2), administrasi merupakan rangkaian pelaksanaan dan pengurusan seluruh cara dalam suatu kerjasama. Menurut Chandler dan Plano (1988), administrasi publik adalah salah satu proses dimana sumber daya dan anggota publik dijalankan untuk membuat formulasi, implementasi, dan pengelolaan keputusan dalam kebijakan publik.

Lembaga Administrasi Negara (2003: 3) menguraikan bahwa administrasi publik adalah kegiatan administrasi yang berkaitan dengan negara dalam semua arti, unsur, dimensi, dan dinamika. Peran administrasi publik tersebut termasuk juga memberikan dukungan serta mempunyai tugas penyelenggaraan negara, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, maupun melakukan pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Administrasi publik adalah bentuk organisasi atau manajemen, tetapi dikatakan bahwa administrasi merupakan sebuah kerjasama (Pffifner dan Presthus, 2002: 20). Sedangkan menurut Nicholas dan Hendry (1975: 56) menjelaskan bahwasanya administrasi publik merupakan perpaduan antara teori dan praktik yang bertujuan untuk mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Beberapa definisi administrasi publik yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat tarik kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan kolaborasi antara individu atau lembaga organisasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

1.6.2.2 Kebijakan Publik

1.6.2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipakai untuk menguraikan perilaku orang atau sejumlah orang dalam suatu bintang tertentu (Winarno, 2014: 19). Kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai pola aktivitas tertentu, yang terdiri dari serangkaian keputusan terkait tindakan untuk mencapai tujuan dengan cara-cara khusus. Dengan demikian, konsep kebijakan publik berkaitan dengan tujuan serta pola aktivitas pemerintahan yang berkaitan dengan berbagai masalah. (Sulaiman, 1998: 24).

Kebijakan publik adalah salah satu aspek dari administrasi publik yang berkaitan dengan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan. Dimensi kebijakan dapat dianalogikan dengan fungsi otak yang selalu menentukan tindakan yang akan diambil oleh sistem tubuh atau struktur organisasi, melalui energi atau sistem penggerak serta pengendalian yang diwakili oleh dimensi manajemen (Keban, 2008: 57). Menurut Mulyadi (2016: 3) menjelaskan bahwasanya kebijakan publik sebagai suatu proses yang mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan dan saling terhubung, yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai masalah publik serta memanfaatkan sumber daya yang ada demi kesejahteraan masyarakat. Peter Bridgman dan Glyn Davis (2004: 4) menjelaskan bahwa banyaknya definisi mengenai kebijakan publik membuat sulitnya menentukan sebuah definisi yang tepat mengenai kebijakan publik.

Berdasarkan beberapa definisi kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat tarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan isu sosial, ekonomi, politik dalam masyarakat.

1.6.2.2.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno dalam Siti Marwiyah (2022: 13) yaitu:

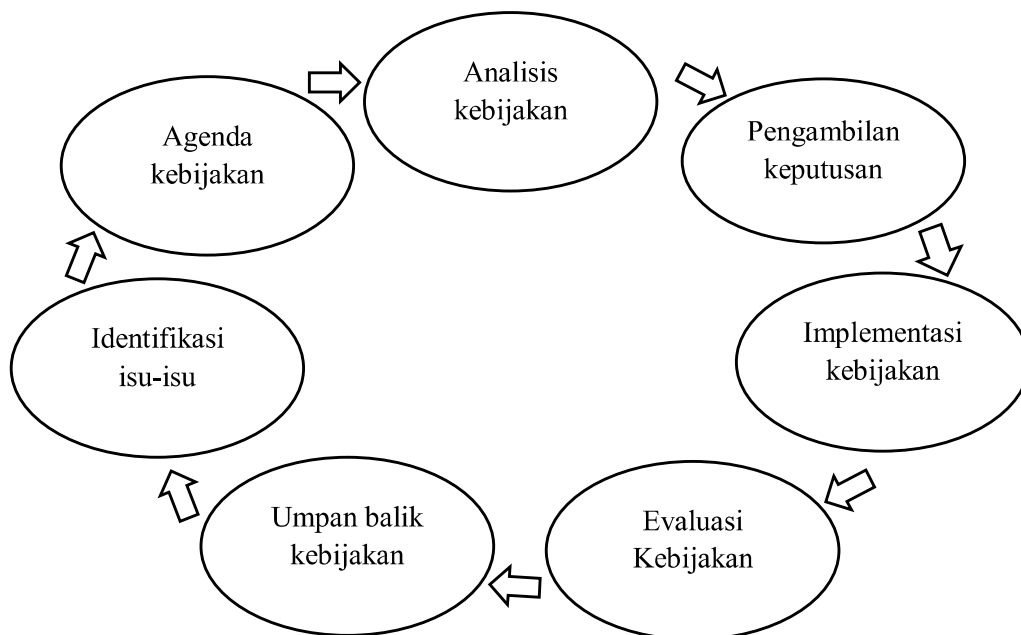
1. Kebijakan publik merupakan tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, bukan sekadar perilaku yang terjadi secara kebetulan.
2. Kebijakan terdiri dari serangkaian tindakan yang saling terkait, dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah melalui keputusan yang bersifat independen.
3. Kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang, tetapi juga melibatkan keputusan terkait implementasi serta penerapan sanksi.
4. Kebijakan berkaitan dengan pernyataan yang sah dan benar yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang tertentu.
5. Kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif, karena mencakup keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, yang dapat menimbulkan masalah, sehingga pemerintah harus bertindak sesuai dengan permasalahan yang ada.

1.6.2.2.3 Proses Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Siti Marwiyah (2022: 15) ada lima tahapan dalam proses kebijakan publik antara lain:

1. Formasi masalah.
2. Formulasi.
3. Adopsi.
4. Implementasi.
5. Evaluasi.

Sedangkan proses kebijakan menurut Badjuri dan Yuwono (2002: 44) digambarkan dalam Gambar 1.6 berikut ini



Gambar 1.5 Bagan Proses Kebijakan Publik

(Sumber: Badjuri dan Yuwono, 2002: 44)

Proses kebijakan dimulai dari identifikasi isu-isu, kemudian berproses melalui analisi dan implemetasi, kemudian evaluasi dari dampak kebijakan dilanjutkan dengan umpan balik kebijakan dan seterusnya umpan balik tersebut menjadi bagian dari indentifikasi isu-isu pada tahap awal (Badjuri dan Yuwono, 2002: 44).

Sedangkan Jones (1996) Tahap-tahap kebijakan publik menurut Jones yaitu:

1. Persepsi.
2. Definisi.
3. Agresi.
4. Organisasi.
5. Representasi.
6. Formulasi.
7. Legitimasi.

8. Apropriasi.
9. Terminasi.

Proses pembuatan kebijakan publik adalah suatu proses yang kompleks, karena melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli membagi proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahapan. Tujuan pembagian ini yaitu untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik.

Tabel 1.4 Tahap Analisis Kebijakan

Tahap	Karakteristik
Perumusan masalah	Memberikan informasi terkait kondisi yang menimbulkan masalah
<i>Forecasting</i> (Peramalan)	Memberikan informasi terkait konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
Rekomendasi kebijakan	Memberikan informasi terkait manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
Monitoring kebijakan	Memberikan informasi terkait karakteristik konsekuensi sekarang dan masa lalu diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
Evaluasi kebijakan	Memberikan informasi terkait kinerja atau hasil dari sebuah kebijakan.

Sumber: Subarsono, dalam Dwiyanto Indiahono, (2009: 21)

Tabel 1.4 diatas menjelaskan bahwasanya kebijakan publik mempunyai dimensi yang sangat luas mulai dari perumusan masalah, peramalan, rekomendasi kebijakan, monitoring kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik diharapkan mampu memberikan manfaat dan memecahkan permasalahan sosial sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1.6.2.3 Evaluasi Kebijakan

1.6.2.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merujuk pada penerapan berbagai skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian yang menggambarkan upaya untuk menganalisis hasil kebijakan berdasarkan satuan nilai tertentu. Dalam pengertian yang lebih spesifik, evaluasi berkaitan dengan pengumpulan informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan memiliki nilai, hal tersebut disebabkan karena kontribusinya terhadap pencapaian tujuan atau sasaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat efektivitas yang signifikan, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan telah dijelaskan atau diatasi (Dunn, 2003: 608).

Evaluasi merupakan suatu rangkaian proses kebijakan publik. Evaluasi adalah proses penilaian tingkat kinerja suatu kebijakan yang dilaksanakan saat kebijakan tersebut telah berjalan cukup lama (Subarsono, 2008: 119). Dunn (2003: 608) menjelaskan bahwasanya evaluasi memiliki makna yang berkesinambungan, yang dimana saling merujuk pada aplikasi beberapa skala nilai dari hasil kebijakan dan program. Secara umum pengertian, evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran, pemberian angka, dan penilaian, yang menggambarkan upaya untuk menganalisis hasil kebijakan berdasarkan satuan nilai tertentu.

Menurut Jones dalam Santoso (2008: 43), evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap kemampuan pemerintah dalam suatu proses dan programnya, sedangkan Anderson dalam Santoso (2008: 44), evaluasi kebijakan dirumuskan secara singkat sebagai penilaian terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Secara umum definisi evaluasi kebijakan menurut Jones dan Anderson, sama-sama menekankan pada penilaian dari suatu hasil kebijakan publik. Namun, Anderson menjelaskan lebih dalam terkait hal apa saja yang dinilai dalam evaluasi kebijakan. Hal-hal tersebut diantaranya isi, implementasi, maupun dampaknya.

Berdasarkan pengertian para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan adalah proses penilaian terhadap hasil kebijakan dan program dengan menggunakan berbagai skala nilai untuk menganalisis manfaat atau dampak yang tercapai. Evaluasi bertujuan untuk menilai apakah kebijakan telah mencapai tujuannya, apakah relevan untuk dipertahankan, serta untuk memperbaiki kebijakan di masa depan.

1.6.2.3.2 Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Badjuri dan Yuwono (2002: 132), evaluasi kebijakan memiliki tiga tujuan yaitu:

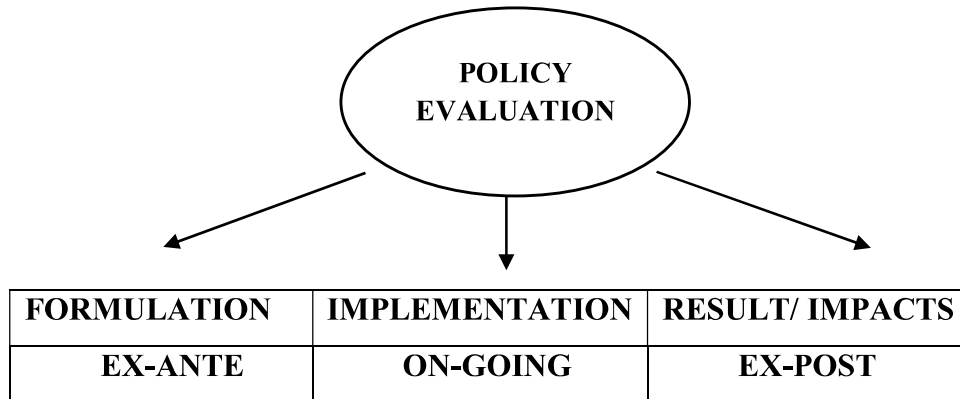
1. Untuk menguji apakah kebijakan yang diterapkan telah mencapai tujuannya.
2. Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah dijalankan.
3. Untuk memberikan kontribusi bagi kebijakan publik di masa depan

Selain itu, Badjuri dan Yuwono (2002: 133) juga menjelaskan bahwasanya evaluasi kebijakan publik dapat membantu dalam:

1. Menilai apakah kebijakan tersebut masih relevan untuk dipertahankan di tengah perubahan yang terjadi.
2. Memberikan pemikiran tentang apakah ada pendekatan lain yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Menguji apakah dampak kebijakan yang diinginkan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
4. Menilai apakah program tersebut perlu diperluas, dipersempit, diperpanjang, atau bahkan dihentikan.
5. Memutuskan apakah di masa depan, sumber daya yang mendukung kebijakan perlu ditambah, dikurangi, atau dihentikan sepenuhnya.

1.6.2.3.3 Jenis Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Islamy dalam Suwitri (2009: 91) Jenis evaluasi kebijakan dapat dilihat pada gambar 1.7 dibawah ini:



Gambar 1.6 Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Proses

(Sumber: Suwitri, 2009: 91)

Berdasarkan gambar 1.7 Evaluasi *ex-ante* dilakukan dalam proses formulasi kebijakan, khususnya dalam melihat alternatif. Evaluasi *ex-ante* juga sering didefinisikan sebagai analisis yang meliputi evaluasi perkiraan implementasi dan dampak yang terjadi setelah implementasi serta konsekuensi yang dilakukan melalui metode peramalan. Evaluasi *ex-ante* dipakai oleh para pembuat kebijakan untuk merumuskan penyesuaian kebijakan yang dibutuhkan (Suwitri, 2009: 92).

Evaluasi *on-going* berusaha melihat proses implementasi program atau proyek. Evaluasi *on-going* tidak lepas dari kerangka input dan output sehingga dalam penelitian mengenai evaluasi *on-going* memakai teori evaluasi yang di dalamnya terkandung kerangka *input* dan *output*.

Evaluasi *ex-post* lebih dikatakan sebagai evaluasi dampak kebijakan. Evaluasi dampak hampir sama dengan evaluasi implementasi yang memperhatikan kerangka *input* dan *output*. Akan tetapi, keduanya dapat dibedakan dari jangka waktu dampak yang diperhatikan dalam evaluasi itu

sendiri. Evaluasi implementasi mengamati dampak jangka pendek atau sementara, sedangkan evaluasi dampak mengamati dampak tetap atau jangka panjang. Selain itu, evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap *output* dibandingkan dengan evaluasi implementasi (Suwitri, 2009: 92).

Berdasarkan pengertian jenis evaluasi berdasarkan proses tersebut, penelitian ini menggunakan jenis evaluasi hasil yang dimana untuk menilai pencapaian dari suatu kegiatan, program, atau tindakan yang telah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, serta untuk menentukan apakah proses yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana yang ada.

1.6.2.3.4 Indikator Evaluasi Kebijakan

Menurut Bridgman dan Davis (2000: 130) evaluasi kebijakan dapat mengacu pada empat indikator yaitu:

1. *Input*

Input kebijakan berkaitan dengan penilaian sumber daya pendukung yang dibutuhkan mencakup sumber daya manusia, dana atau infrastruktur. *Input* kebijakan berkaitan dengan penilaian kuantitas maupun kualitas sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan.

2. *Proses*

Proses kebijakan berkaitan dengan bagaimana cara dalam pelaksanaan kebijakan yang dijalankan pemerintah sebagai bentuk pelayanan langsung kepada sasaran kebijakan.

3. *Output*

Output kebijakan berkaitan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan.

4. *Outcome*

Outcome kebijakan berkaitan dengan dampak dari pelaksanaan kebijakan yang dimana mencakup dampak positif dan dampak negatif.

Sedangkan menurut Dunn (2000: 608), indikator evaluasi kebijakan antara lain:

1. Efektivitas

Efektivitas berhubungan dengan apakah suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diinginkan atau dapat dikatakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Efisiensi

Efisiensi berkaitan pada kuantitas usaha yang dibutuhkan untuk mencapai efektivitas tertentu. Efisiensi diukur dari biaya moneter dan ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

3. Kecukupan

Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkatan efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, kesempatan, seta lebih menekankan pada kuatnya hubungan antara kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Perataan

Perataan berkaitan dengan kebijakan yang tujuannya berorientasi pada perataan dan secara adil disebarkan kepada sasaran kebijakan.

5. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai dari kelompok masyarakat tertentu

6. Ketepatan

Ketepatan berkaitan dengan nilai atau manfaat dari suatu tujuan kebijakan serta asumsi yang mendasari tujuan-tujuan tersebut.

Dalam evaluasi kebijakan menurut Bridgman dan Davis (2000: 130) lebih melihat keseluruhan siklus kebijakan yaitu dengan indikator *input*, proses, *output*, dan *outcome*. Masing-masing dari indikator tersebut memiliki fokus penelitian yang sesuai dengan tahapan kebijakan. Sedangkan menurut Dunn

(2000: 608), evaluasi kebijakan dilakukan dengan melihat dari ukuran tertentu mulai dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

Sedangkan menurut Suharto (2010), evaluasi kebijakan memiliki indikator diantaranya:

1. Fokus pada Nilai

Evaluasi difokuskan pada penilaian terkait kebutuhan kebijakan dan program, terutama usaha untuk menentukan manfaat dari kebijakan atau program tersebut. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan sering kali dapat dipertanyakan.

2. Interdependensi Fakta dan Nilai

Tuntutan evaluasi bergantung pada "fakta" maupun "nilai". Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang optimal, tidak hanya diperlukan bahwa hasil-hasil kebijakan memberikan manfaat secara keseluruhan.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lalu

Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil yang terjadi sekarang dan di masa lalu, bukan pada hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif, dilakukan setelah tindakan-tindakan dilakukan. Rekomendasi, yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan disusun sebelum tindakan diambil.

4. Dualitas Nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi memiliki kualitas ganda, karena mereka dianggap sebagai tujuan sekaligus sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nilai-nilai sering kali disusun dalam suatu hirarki yang mencerminkan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Menurut Sudjana dan Ibrahim (2004: 239) dimensi evaluasi kebijakan sebagai berikut:

1. *Content*

Content berhubungan dengan kondisi atau latar belakang yang mempengaruhi penentuan tujuan dan strategi yang akan dirancang dalam kebijakan tersebut.

2. *Input*

Input berhubungan dengan penggunaan bahan dan rencana strategi yang ditentukan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan.

3. Proses

Proses berhubungan dengan pengimplementasian strategi dan pemakaian bahan di lapangan.

4. Produk

Produk memuat dengan hasil yang diperoleh, baik selama proses maupun pada akhir pengembangan sistem pendidikan yang bersangkutan.

Evaluasi kebijakan menurut Suharto (2010) lebih melihat pada ukuran-ukuran tertentu seperti fokus nilai, interdependensi fakta-nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dan dualitas nilai. Sedangkan menurut Sudjana dan Ibrahim (2004: 239), evaluasi kebijakan memiliki dimensi yang hampir sama dengan Brigdman dan Davis namun tidak menyertakan dampak sehingga dalam pelaksanaan evaluasi tidak melihat dari sisi dampaknya.

Berdasarkan elaborasi yang telah dilakukan peneliti terhadap teori yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, penelitian ini akan menggunakan model evaluasi kebijakan menurut Bridgman dan Davis dengan indikator *input*, proses, *output*, dan *outcome* karena sesuai dengan permasalahan penelitian, selain itu peneliti juga ingin mengevaluasi terkait keseluruhan siklus kebijakan yang dimana *Input* kebijakan akan melihat terkait kuantitas dan kualitas sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan, Proses akan melihat bagaimana cara atau metode yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan, *Output* kebijakan

akan melihat sejauh mana hasil dari pelaksanaan kebijakan, sedangkan *outcome* akan menunjukkan dampak yang muncul dari pelaksanaan kebijakan.

1.6.2.3.5 Faktor Penghambat Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (1994: 149), beberapa faktor penghambat kebijakan yaitu:

a. Isi kebijakan

Suatu kebijakan yang diterapkan mengalami kegagalan karena masih samarnya isi kebijakan serta belum adanya pemahaman yang jelas terkait isi kebijakan dari pelaksana maupun sasaran kebijakan.

b. Informasi

Para pelaksana kebijakan yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu untuk disampaikan kepada sasaran kebijakan namun informasi ini justru tidak ada karena sulitnya komunikasi dalam penyampaian informasi.

c. Dukungan

Dalam pelaksanaan kebijakan tentu memerlukan adanya dukungan. Suatu kebijakan akan sulit berhasil apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan dari berbagai pihak.

d. Pembagian Potensi

Kegagalan suatu kebijakan juga ditentukan dari aspek potensi para pelaku yang terlibat dalam kebijakan yang mencakup struktur birokrasi, tugas dan wewenang pelaksana kebijakan.

Faktor penghambat kebijakan yang dikemukakan oleh Bambang Sunggono lebih menekankan pada kegagalan kebijakan akibat ketidakjelasan isi kebijakan, kesulitan dalam penyampaian informasi, dan ketidakoptimalan dalam pembagian potensi di antara pelaksana kebijakan.

Sementara menurut Darwin (1999) menyatakan bahwa ada 5 faktor penghambat kebijakan, yaitu:

1. Kepentingan

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, seringkali muncul konflik antara kelompok sasaran atau masyarakat, yang menunjukkan adanya kemungkinan kelompok tertentu diuntungkan oleh kebijakan tersebut.

2. Azas Manfaat

Dalam pemerintahan yang efektif, pemerintah harus mampu menyelesaikan masalah yang ada, meskipun tidak semua persoalan dapat diselesaikan karena keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mengatasi semua isu yang muncul dalam masyarakat.

3. Budaya

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah perubahan perilaku dari kelompok sasaran atau masyarakat, yang sebelumnya melakukan suatu hal dengan pola tertentu sebelum adanya kebijakan, dan kemudian beradaptasi dengan pola baru yang ditetapkan oleh kebijakan tersebut.

4. Aparat Pelaksana

Aparat pelaksana memiliki peran penting dalam menentukan kesuksesan atau kesulitan dalam implementasi suatu kebijakan publik. Kemampuan dan efisiensi aparat pelaksana dapat mempengaruhi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil diterapkan.

5. Anggaran

Keberhasilan pelaksanaan suatu program sangat bergantung pada dukungan sumber daya yang memadai, termasuk dana, peralatan teknologi, serta sarana dan prasarana lainnya.

Faktor penghambat kebijakan yang dikemukakan Darwin lebih menyoroti faktor eksternal, seperti kepentingan yang bisa menyebabkan konflik antara kelompok sasaran atau masyarakat, serta budaya yang mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Darwin juga menekankan pentingnya aparat pelaksana yang efisien dalam

mengimplementasikan kebijakan dan bagaimana anggaran yang memadai menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Menurut Deddy Mulyadi (2016: 122) faktor penghambat kebijakan antara lain:

1. *Content* kebijakan

Kebijakan yang baik dari sisi *content* setidaknya memiliki sifat yang jelas dan mudah dikomunikasikan ke kelompok target.

2. *Implementator*

Berkaitan dengan pelaksana kebijakan yang harus memiliki kapabilitas, dan kompetensi untuk melaksanakan kebijakan.

3. Lingkungan

Kondisi sosial, ekonomi dan sistem politik serta dukungan publik mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

4. Masyarakat

Berkaitan dengan kelompok sasaran tempat kebijakan dilaksanakan.

Faktor penghambat kebijakan menurut Dedy Mulyadi lebih menekankan *content* kebijakan yang harus jelas dan mudah dikomunikasikan, *implementator* yang perlu memiliki kapabilitas dan kompetensi yang baik, lingkungan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, politik, dan dukungan publik, dan masyarakat sebagai kelompok sasaran yang terlibat dalam kebijakan.

Berdasarkan faktor penghambat kebijakan yang telah dikemukakan para ahli, peneliti melakukan elaborasi sehingga penelitian ini akan menggunakan faktor penghambat kebijakan menurut Bambang Sunggono karena sesuai dengan permasalahan penelitian. Indikatornya meliputi isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Isi kebijakan akan melihat terkait kejelasan dan ketepatan serta pemahaman pelaksana dan sasaran kebijakan terkait isi kebijakan tersebut. Informasi akan melihat bagaimana cara penyampaian informasi dan cara komunikasi, serta kemudahan mengakses informasi dan komunikasi. Dukungan akan melihat sejauh mana pelaksanaan kebijakan

mendapat respon baik dari berbagai pihak terkait. Sedangkan pembagian potensi akan melihat kejelasan dan ketepatan struktur birokrasi maupun tugas dan wewenang pelaksana kebijakan.

1.6.2.4 Penanaman Modal

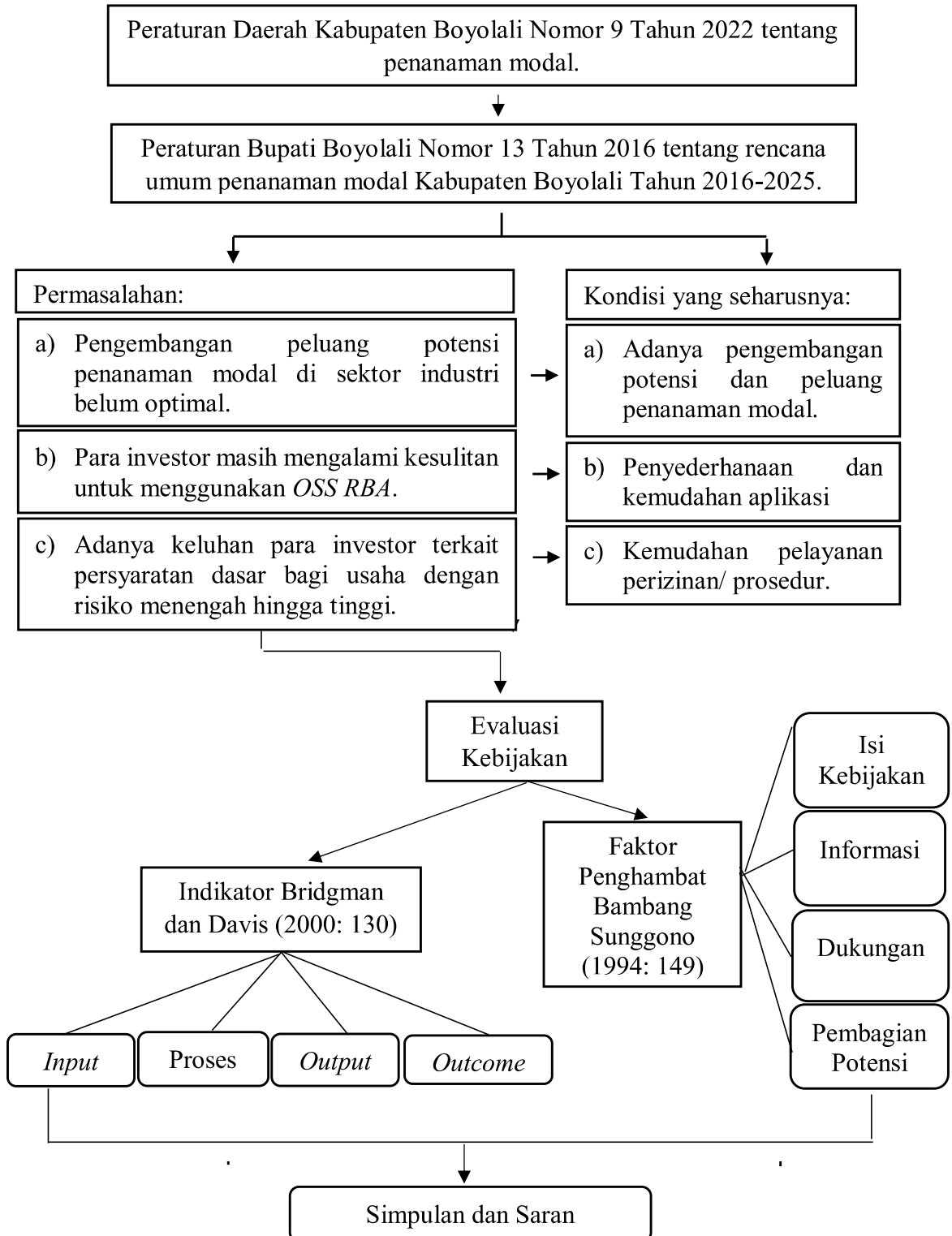
1.6.2.4.1 Pengertian Penanaman Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal merujuk pada segala aktivitas yang dilakukan untuk menanamkan modal baik oleh investor domestik maupun asing dengan tujuan melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal diartikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan mengganti atau menambah barang modal ekonomi yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan (Sukirno, 2009: 366).

1.6.2.4.2 Jenis Penanaman Modal

- A. Berdasarkan Subjeknya
 - a. Investasi Pemerintah, merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - b. Investasi Swasta, adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan.
- B. Berdasarkan Alasannya
 - a. Investasi Dalam Negeri, adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor domestik di dalam negeri sendiri.
 - b. Investasi Asing, adalah penanaman modal yang berasal dari luar negeri, yang digunakan di dalam negeri untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang belum dimanfaatkan.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Metode Penelitian

1.8 a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah dimana penulis adalah sebagai instrument kunci. Sedangkan menurut Sugiyono (2019) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, jenis penelitian deskriptif kualitatif sangat cocok digunakan pada penelitian ini karena dengan penelitian deskriptif kualitatif, penulis mampu mendeskripsikan keadaan yang diteliti di lapangan secara lebih spesifik, transparan dan mendalam terkait evaluasi Kebijakan Pro Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Boyolali.

1.8 b. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Ruang lingkup/ fokus penelitian adalah pembatasan masalah yang masih bersifat umum menjadi pokok sebuah masalah (Sugiyono, 2019: 275). Fokus penulisan dalam penelitian tesis ini berkaitan dengan evaluasi Kebijakan Pro Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Boyolali.

1.8 c. Fenomena Penelitian

Fenomena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah salah satu peristiwa yang terjadi secara nyata yang dapat dilihat menggunakan panca indra, dinilai secara ilmiah. Fenomena penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Evaluasi Kebijakan Pro Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Boyolali.

Evaluasi Kebijakan Pro Investasi akan dinilai menggunakan kriteria evaluasi Bridgman dan Davis (2000:130) meliputi *input*, proses, *output*, dan *outcome*.

A. *Input*

Input berfokus pada penilaian sumber daya pendukung yang dibutuhkan mencakup sumber daya manusia, dana atau infrastruktur. *Input* kebijakan berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan.

Fenomena yang diamati yaitu:

- a) Sumber daya manusia, meliputi jumlah pegawai dan kapasitas kompetensi yang dimiliki DPMPTSP dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi.
- b) Dana, meliputi ketersediaan serta kecukupan dana Anggaran Pembelanjaan Bulanan Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi.
- c) Infrastruktur, meliputi ketersediaan dan kondisi sarana prasarana, serta upaya pemenuhan sarana prasarana oleh DPMPTSP dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi.

B. Proses

Proses kebijakan menjelaskan bagaimana cara dalam pelaksanaan kebijakan yang dijalankan pemerintah sebagai bentuk pelayanan langsung kepada sasaran kebijakan.

Fenomena yang diamati:

- a) Metode, meliputi cara yang dilakukan DPMPTSP dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi.

C. *Output*

Output kebijakan berfokus pada hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan. Fenomena yang diamati:

- a) Hasil Kebijakan Pro Investasi, meliputi kesesuaian hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan jumlah sasaran kebijakan yang mengikuti Kebijakan Pro Investasi.

D. *Outcome*

Outcome kebijakan menjelaskan terkait dampak dari pelaksanaan kebijakan yang dimana mencakup dampak positif dan dampak negatif. Fenomena yang diamati:

- a) Dampak, meliputi dampak positif dan negatif Kebijakan Pro Investasi.

2. Faktor penghambat Kebijakan Pro Investasi pada DPMPTSP Kabupaten Boyolali.

Dalam penentuan faktor penghambat Kebijakan Pro Investasi pada DPMPTSP Kabupaten Boyolali menggunakan kriteria menurut Bambang Sunggono (1994: 149) yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan dan pembagian potensi.

A. Isi Kebijakan

Suatu kebijakan yang diterapkan mengalami kegagalan karena masih samarnya isi kebijakan serta belum adanya pemahaman yang jelas terkait isi kebijakan dari pelaksana maupun sasaran kebijakan. Fenomena yang diamati:

- a) Isi Kebijakan Pro Investasi, meliputi kejelasan isi Kebijakan Pro Investasi, ketepatan isi kebijakan dengan kebutuhan investor, pemahaman DPMPTSP dan investor tentang isi Kebijakan Pro Investasi.

B. Informasi

Para pelaksana kebijakan yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu untuk disampaikan kepada sasaran kebijakan namun informasi ini justru tidak ada karena sulitnya

komunikasi dalam penyampaian informasi. Fenomena yang diamati:

- a) Informasi, meliputi ketersediaan informasi dari DPMPTSP, dan media dalam penyampaian informasi antara DPMPTSP dan investor.
- b) Komunikasi, meliputi ketersediaan saluran komunikasi oleh DPMPTSP kepada investor, dan kemudahan komunikasi DPMPTSP dengan investor.

C. Dukungan

Dalam pelaksanaan kebijakan tentu memerlukan adanya dukungan. Suatu kebijakan akan sulit berhasil apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan dari berbagai pihak.

Fenomena yang diamati:

- a) Dukungan, meliputi dukungan dari Organisasi Pemerintah Daerah dan DPRD, serta kemunculan respon penolakan dari investor maupun masyarakat terkait pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi.

D. Pembagian potensi

Kegagalan suatu kebijakan juga ditentukan dari aspek potensi para pelaku yang terlibat dalam kebijakan yang mencakup struktur birokrasi, tugas dan wewenang pelaksana kebijakan.

Fenomena yang diamati yaitu:

- a) Struktur birokrasi DPMPTSP, meliputi ketersediaan dan kejelasan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi.
- b) Tugas dan wewenang DPMPTSP, meliputi kejelasan dan ketepatan pelaksanaan tugas dan wewenang DPMPTSP dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi.

Untuk lebih jelas dalam melihat fenomena pengamatan evaluasi Kebijakan Pro Investasi pada DPMPTSP di Kabupaten Boyolali, berikut penulis menyajikan dalam bentuk tabel 1.5:

Tabel 1.5 Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati
	Evaluasi Kebijakan		
1.	<i>Input</i>	a) Sumber Daya Manusia	a. Jumlah pegawai DPMPTSP sebagai pelaksana Kebijakan Pro Investasi b. Kapasitas kompetensi yang dimiliki pegawai DPMPTSP sebagai pelaksana Kebijakan Pro Investasi
		b) Dana	a. Ketersediaan dana APBD dan DAK dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi. b. Kecukupan dana APBD dan DAK dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi.
		c) Infrastruktur	a. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi. b. Kondisi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi. c. Upaya DPMPTSP dalam pemenuhan sarana dan prasarana pada pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi
2.	Proses	a) Metode	Cara yang dilakukan DPMPTSP dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi.
3.	<i>Output</i>	a) Hasil Kebijakan Pro Investasi	a. Kesesuaian hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi.

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati
			b. Jumlah investor yang mengikuti Kebijakan Pro Investasi.
4.	<i>Outcome</i>	a) Dampak	Dampak positif dan negatif dari pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi
Faktor Penghambat			
1.	Isi Kebijakan	a) Isi Kebijakan Pro Investasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kejelasan isi Kebijakan Pro Investasi b. Ketepatan isi kebijakan dengan kebutuhan investor dalam Kebijakan Pro Investasi. c. Pemahaman DPMPTSP dan Investor tentang isi Kebijakan Pro Investasi
2.	Informasi	a) Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan informasi yang berkaitan dengan Kebijakan Pro Investasi b. Media yang digunakan DPMPTSP dalam penyampaian informasi kepada investor
		b) Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan saluran komunikasi oleh DPMPTSP kepada investor b. Kemudahan komunikasi antara DPMPTSP dan investor terkait Kebijakan Pro Investasi
3.	Dukungan	a) Dukungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dukungan Organisasi Pemerintah Daerah dan DPRD terkait Kebijakan Pro Investasi. b. Kemunculan respon penolakan dari investor maupun masyarakat terkait pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi.

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati
4.	Pembagian Potensi	a) Struktur birokrasi DPMPTSP	Ketersediaan dan kejelasan struktur birokrasi DPMPTSP dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi
		b) Tugas dan wewenang DPMPTSP	Kejelasan dan ketepatan pelaksanaan tugas wewenang DPMPTSP dalam Kebijakan Pro Investasi.

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

1.8 d. Jenis dan Sumber Data

Menurut Arikunto (2002) data merupakan bukti nyata yang bisa digunakan untuk menyusun suatu informasi. Data penelitian dapat diperoleh dari beberapa sumber yang dikumpulkan dengan beberapa teknik pada saat di lapangan. Untuk melengkapi data pada penelitian ini diperlukan beberapa sumber antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer didapatkan secara langsung oleh peneliti (Sugiyono, 2019: 296). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan serta melalui pengamatan langsung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk menyempurnakan data primer (Sugiyono, 2019: 296). Sumber data sekunder biasanya digunakan peneliti di dalam melakukan analisis data penelitian untuk mendapatkan hasil yang akurat. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis berasal dari buku, regulasi/undang-undang, serta literatur yang sesuai dengan penelitian terkait evaluasi Kebijakan Pro Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Boyolali.

1.8 e. Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive* untuk informan pertama yaitu DPMPTSP Kabupaten Boyolali. Penggunaan teknik *purposive* artinya pengambilan informan dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu yaitu dianggap paling mengetahui dengan benar atau terpercaya terkait penelitian sehingga data yang di dapat akurat dan sesuai fakta. Untuk informan selanjutnya yaitu diperoleh dengan menggunakan teknik *snowball* yang dimana informan pertama akan mengarahkan kepada peneliti untuk mendapatkan informan selanjutnya. Informan yang dipilih yaitu:

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipilih menjadi informan dikarenakan pihak tersebut mengetahui dengan benar terkait pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi namun tidak terlibat sepenuhnya dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi.
- b. Koordinator bidang penanaman modal, dipilih menjadi informan dikarenakan pihak tersebut sangat mengetahui dan terlibat sepenuhnya dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi.
- c. Subkoordinator bidang penanaman modal, dipilih menjadi informan dikarenakan pihak tersebut sangat mengetahui dan terlibat sepenuhnya dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi.
- d. Investor, dipilih menjadi informan dikarenakan pihak tersebut merupakan sasaran dari pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi yang dimana tentunya mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi
- e. Masyarakat, dipilih menjadi informan dikarenakan pihak tersebut merasakan dampak atau manfaat yang muncul dari pelaksanaan Kebijakan Pro Investasi.

1.8 f. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (Sugiyono, 2019: 102). Peneliti kualitatif, sebagai *human instrument* bertujuan menentukan fokus penelitian, penentuan informan, pengumpulan data, penilaian kualitas data, menganalisis data, menginterpretasikan data dan memutuskan hasilnya (Sugiyono, 2019). Alat-alat yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, kamera, alat perekam dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan evaluasi Kebijakan Pro Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Boyolali.

1.8 g. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2019: 30), Teknik pengumpulan data adalah prosedur awal pada pelaksanaan suatu penelitian. Bagi seorang peneliti tentu sangat penting untuk mengetahui teknik pengumpulan data pada saat melakukan penelitian guna memperoleh data yang akurat serta memenuhi standar kriteria. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini sendiri antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang menyeluruh. Data observasi dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi partisipatif yang dimana peneliti terlibat langsung atau turun langsung ke lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dijelaskan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara langsung, terstruktur dan mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi pada penelitian ini diperoleh melalui dokumen, regulasi/undang-undang foto atau gambar, serta arsip DPMPTSP yang berkaitan dengan penelitian.

1.8 h. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan interaktif model dari Miles & Hubberman (2014: 120-14) meliputi:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Tahap analisis data ini mendukung validitas kebijakan dimana pada tahap ini tentu peneliti dapat memastikan bahwa hanya data yang relevan dan signifikan yang digunakan dalam analisis sehingga akan menghasilkan temuan yang akurat.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Penyajian data digambarkan dengan realita yang sebenarnya dalam bentuk uraian singkat, diagram dan tabel, mengingat informasi yang diterima tidak tertata dengan baik dan jelas. Tahap analisis data ini mendukung validitas kebijakan karena pada tahap ini, peneliti mampu meningkatkan transparansi dan pemahaman

terkait hasil analisis yang dimana tentunya menyebabkan pembuat kebijakan mampu untuk mengambil keputusan yang dengan jelas.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses dalam penetapan kesimpulan yang didasarkan dari data yang diperoleh sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan kemudian ditarik kesimpulan akhir apabila data sudah terkumpul seluruhnya. Tahap analisis data ini mendukung validitas kebijakan karena pada tahap ini, peneliti dapat menjamin kesimpulan yang diambil adalah benar karena data yang diperoleh telah dianalisis dan disajikan dengan baik.

1.8 i. Keabsahan Data

Menurut Wijaya (2018: 119-121) triangulasi data adalah teknik meninjau keakuratan data penelitian yang diperoleh dengan berbagai metode dan dari waktu ke waktu. Triangulasi data untuk penelitian ini meliputi:

1. Triangulasi Sumber

Dilakukan untuk menguji keakuratan informasi dengan cara menelaah informasi dari berbagai sumber, tetapi menggunakan teknik yang sama. Dalam penelitian ini, pelaksanaan triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda namun dengan teknik yang sama seperti wawancara dengan informan yang berbeda. Data yang terkumpul tersebut kemudian dilakukan pengkategorian data yang sama untuk memudahkan dalam analisis data. Selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian data yang dimana peneliti akan membandingkan hasil data dari berbagai sumber tersebut, jika data yang diperoleh saling mendukung tentu akan memperkuat temuan dan memberikan kepercayaan lebih tinggi terhadap validitas hasil penelitian. Namun, jika data yang diperoleh berbeda peneliti harus menganalisis perbedaan tersebut untuk mencari tahu mengapa hasil

yang diperoleh berbeda. Setelah selesai menganalisis data dari berbagai sumber tersebut, peneliti harus melakukan penarikan kesimpulan temuan apakah konsisten atau ada perbedaan hasil.

2. Triangulasi Teknik

Dilakukan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dari satu sumber tetapi dengan bermacam teknik. Dalam penelitian ini, pelaksanaan triangulasi teknik dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber yang sama namun menggunakan metode yang berbeda. Peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan teknik pertama, misalnya observasi setelah itu diverifikasi melalui wawancara. Setelah data terkumpul kemudian melakukan pengkategorian data untuk selanjutnya data disajikan sesuai dengan pengkategorian yang telah dilakukan. Tahap selanjutnya yaitu peneliti akan membandingkan hasil data yang diperoleh, jika data yang diperoleh saling mendukung tentu akan memberikan kepercayaan lebih tinggi terhadap validitas hasil penelitian. Namun, jika terdapat perbedaan data maka peneliti harus menganalisis perbedaan tersebut untuk mencari tahu alasan hasil yang diperoleh berbeda. Setelah selesai menganalisis data dari berbagai teknik tersebut, peneliti harus menarik kesimpulan pada temuan apakah konsisten atau terdapat perbedaan hasil.